

**KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG TERHADAP PENINGKATAN
KEHADIRAN MILITER TIONGKOK DI LAUT TIONGKOK TIMUR,
2016—2019**

(Skripsi)

Oleh

M.GHAZY RAMADHAN JAUHARI

NPM 1816071036



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS LAMPUNG

BANDAR LAMPUNG

2023

ABSTRAK

KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG TERHADAP PENINGKATAN KEHADIRAN MILITER TIONGKOK DI LAUT TIONGKOK TIMUR, 2016—2019

Oleh

M. GHAZY RAMADHAN JAUHARI

Jepang setelah perang dunia II menjadi negara yang memiliki keunikan terhadap status penggunaan kekuatan militernya sebagai negara yang dibatasi dengan *United States* berperan menjamin keamanan Jepang namun, dengan meningkatnya konflik sengketa teritorial antara Tiongkok dan Jepang menghadirkan militer Tiongkok di wilayah perbatasan Jepang pada Laut Tiongkok Timur menimbulkan kekhawatiran atas keamanan dan pertahanan baik negara maupun masyarakat Jepang sehingga mendorong adanya upaya reinterpretasi kembali Jepang atas artikel 9 yang memperluas fungsi *Japan Self Defense Force* sehingga mendorong pengembangan kapabilitas militer Jepang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan studi pustaka dengan *Offense Defense Theory* serta konsep *Maritime Strategy* untuk melihat kebijakan pertahanan Jepang atas kehadiran militer Tiongkok di wilayah Laut Tiongkok Timur dengan indikator yaitu kapabilitas militer, wilayah geografis, kondisi sosial dan politik, dan opini masyarakat dan pejabat. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pertahanan Jepang terhadap peningkatan kehadiran militer Tiongkok di Laut Tiongkok Timur mengedepankan upaya pencegahan. Peningkatan kapabilitas militer yang dilakukan semata-mata bukan untuk tujuan agresif tetapi untuk mencapai superioritas laut sehingga mampu mempertahankan negaranya sendiri menjadi negara yang normal (*Futsū no Kuni*).

Kata kunci: Jepang, Tiongkok, artikel 9, kapabilitas militer, Laut Tiongkok Timur

ABSTRACT

JAPANESE DEFENSE POLICY TOWARDS INCREASING CHINESE MILITARY PRESENCE IN THE EAST CHINA SEA, 2016—2019

By

M. GHAZY RAMADHAN JAUHARI

After World War II, Japan became a country that was unique in terms of the status of using its military force as a restricted country and the United States have a role to guaranteeing Japan security. In 2016 with the increasing conflict of territorial disputes between China and Japan. The Chinese military activity in the Japanese border area in the East China Sea raises concerns over the security and defense of both the state and the Japanese people, thus encouraging Japan reinterpretation of Article 9 which expand the function of the Japan self defense force to encourage the development of Japan military capabilities. This research is a qualitative research using literature data collection techniques and offense-defense theory with maritime security concept to see Japan defense policies for China military presence in the East China Sea with indicators, military capability, geographical area, social and political condition, and public opinion and officials. The results of the study show that Japan defense policy toward increasing China military in East China Sea prioritizes efforts to deterrence and increasing military capabilities which are carried out solely not for aggressive purpose but to achieve maritime superiority and be able to defend their own country to become a normal country (*Futsū no Kuni*).

Keywords: Japan, China, Article 9, Military Capability, East China Sea

**KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG TERHADAP PENINGKATAN
KEHADIRAN MILITER TIONGKOK DI LAUT TIONGKOK TIMUR,
2016—2019**

Oleh

M. GHAZY RAMADHAN JAUHARI

NPM 1816071036

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pada

**Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **KEBIJAKAN PERTAHANAN JEPANG
TERHADAP PENINGKATAN KEHADIRAN
MILITER TIONGKOK DI LAUT TIONGKOK
TIMUR, 2016—2019**

Nama Mahasiswa : **M. Ghazy Ramadhan Jauhari**

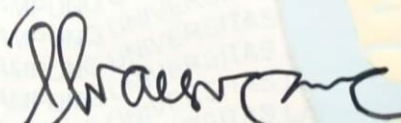
No. Pokok Mahasiswa : **1816071036**

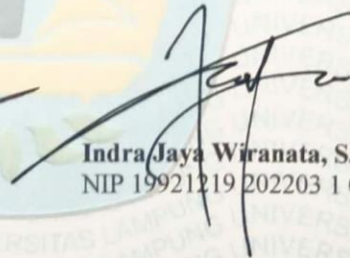
Program Studi : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**


MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.
NIP 19860428 201504 1 004


Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.
NIP 19921219 202203 1 011

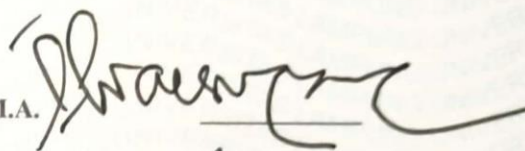
2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional,


Simon Sumanjaya Hutagalung, S.A.N., M.P.A
NIP 19810628 200501 1 003

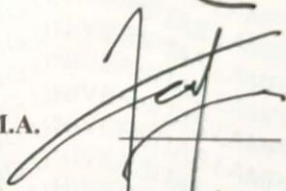
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

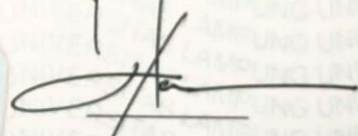
Ketua : Iwan Sulisty, S.Sos., M.A.



Sekretaris : Indra Jaya Wiranata., S.IP., M.A.



Penguji Utama : Hasbi Sidik, S.IP., M.A.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Juni 2023

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 16 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



M. Ghazy Ramadnan Jauhari

NPM. 1816071036

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama M. Ghazy Ramadhan Jauhari, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 6 Januari 2000. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara kandung dari pasangan Bapak Agus Jauhari dan Ibu Fadhilah. Penulis bertempat tinggal di Jalan Purnawirawan 7 No.114G RT.07, Rajabasa Nunyai, Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

Penulis menempuh pendidikan formal di TK AL-Kautsar Bandar Lampung (2005-2006), Sekolah Dasar di SD AL-Kautsar Bandar Lampung (2006-2012), pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP AL-Kautsar Bandar Lampung (2012-2015), dan Sekolah Menengah Atas di SMA AL-Kautsar Bandar Lampung (2015-2018). Pada bulan Agustus tahun 2018, penulis tercatat sebagai mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa Jurusan Hubungan Internasional, penulis aktif dalam beberapa kegiatan kemahasiswaan di internal kampus maupun eksternal kampus seperti bergabung dalam Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) pada tahun 2018. Pada bulan Februari tahun 2021 penulis juga mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Unila Periode I di Rajabasa Nunyai tempat penulis tinggal sampai saat ini. Selanjutnya pada bulan September 2021 penulis melaksanakan magang di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta Selatan.

Motto

“Nothing is harder to see into than peoples nature. The sage looks at subtle phenomena and listens to small voices. This harmonizes the outside with the inside and the inside with the outside”.

(Zhuge Kǒngming)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan segenap puji syukur atas kehadiran Allah SWT.

Saya persembahkan Skripsi ini kepada:

Allah SWT yang senantiasa memberikan kemudahan, kelancaran, dan kesabaran dalam proses penyusunan skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar dan memperoleh hasil yang memuaskan.

Bapak Agus Jauhari dan Ibu Fadhilah,

Tulisan ini merupakan ungkapan terimakasih yang mungkin tidak pernah cukup untuk membalas limpahan kasih sayang dari kedua orang tua yang selalu mendoakan. Segala pencapaian ini tidak terlepas dari lantunan doa, usaha keras, dan semangat. Saya selalu bersyukur kepada Tuhan karena dilahirkan dari orangtua yang hebat seperti Bapak dan Ibu.

Diri Sendiri,

Terimakasih karena selalu memiliki kesabaran dan pemikiran yang unik.

Para Dosen dan Civitas Akademika,

Yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan

Almamater Tercinta,

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah SWT karena atas izin, rahmat, hidayah dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “**Kebijakan Pertahanan Jepang Terhadap Peningkatan Kehadiran Militer Tiongkok di Laut Tiongkok Timur, 2016—2019**” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung;
3. Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung;
4. Iwan Sulisty, S.Sos., M.A. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah membimbing penulis dengan sabar dan memiliki keyakinan terhadap potensi yang dimiliki Penulis;
5. Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang terus mendukung dan menuntun Penulis dalam setiap proses pengerjaan skripsi;
6. Hasbi Sidik, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembahas yang senantiasa memberikan masukan dan arahan agar skripsi penulis dapat lebih baik lagi serta penulis menjadi insan yang bermanfaat di masa depan;

7. Seluruh Dosen-dosen Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang tidak dapat penuliskan sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan ilmu dan pembelajaran berharga kepada penulis dari awal masa perkuliahan hingga penulisan skripsi;
8. Keluarga penulis, Mama, Papa, Adek, Bunda dan Om yang telah mendoakan dan memberikan dukungan moril selama perkuliahan hingga penulis menyelesaikan studinya;
9. M. Calakdo Islami, Khoirunnisa Indah Cahyani, dan Irvan Yama Pradipta, S.Sos., kelompok abadi, yang sejak didirikannya, bersama-sama membantu, mendorong, dan memberikan pengalaman kuliah yang sangat berharga bagi penulis;
10. Yudha Leo Fransisco, Aditya Kusuma, S.Sos., Ciko Satrio., Imam Miswari., Muhammad Alzier Putra Bastian, Dhea Adinda, Sekar Rachmawati, Miftahul Luthfiah, Ajeng Permani Galuhci yang tergabung dalam grup Jomfis, yang menyebarkan aura positif dan komedi sehingga penulis terhibur;
11. Diajeng Bella Puspita, Shindi Philadelpia, Giovanni Albertine, dan M. Hanif Khairy Vidiantara, yang menyebarkan semangat dan dukungan dalam proses skripsi;
12. Colifaturansa dan Salsabilla, penulis ucapkan terimakasih sebesar-besarnya yang tidak lelah membantu dan arahan kepada penulis selama masa administrasi dan pengujian skripsi;
13. Discord Takjinun yang memberikan semangat dengan candaanya yang seringkali tidak jelas dan abstrak;

Bandar Lampung, 16 Juni 2023

Penulis,

M. Ghazy Ramadhan Jauhari

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI -----	i
DAFTAR TABEL -----	iii
DAFTAR GAMBAR -----	iv
DAFTAR SINGKATAN -----	v
I. PENDAHULUAN -----	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
II. TINJAUAN PUSTAKA -----	10
2.1 Penelitian Terdahulu-----	10
2.2 Landasan Konseptual-----	15
2.2.1 <i>Defense Ownership</i> -----	15
2.2.1.1 <i>External Threat</i> -----	15
2.2.1.2 <i>National Capability</i> -----	16
2.2.1.3 <i>Ally Reliability</i> -----	17
2.2.2 <i>Foreign Military Presence</i> -----	17
2.2.3 <i>Arms Dynamic</i> -----	17
2.2.3.1 <i>Action-Reaction Model</i> -----	18
2.2.3.2 <i>Domestic Structure Model</i> -----	18
2.2.3.3 <i>Technological Imperative Model</i> -----	18
2.2.4 <i>Security Dilemma</i> -----	19
2.2.5 <i>Balance of Power</i> -----	19
2.2.6 <i>Deterrence</i> -----	19
2.2.7 <i>Maritime Strategy</i> -----	20
2.2.8 <i>Offense Defense Theory</i> -----	21
2.2.9 <i>Kapabilitas Militer</i> -----	21
2.3 Kerangka Pemikiran-----	22
III. METODE PENELITIAN -----	25

3.1 Jenis Penelitian -----	25
3.2 Fokus Penelitian-----	25
3.3 Jenis dan Sumber Data -----	26
3.4 Teknik Pengumpulan Data -----	27
3.5 Teknik Analisi Data -----	27
IV. PEMBAHASAN-----	29
4.1 Gambaran Umum <i>Military Budget</i> Negara di Asia Timur-----	29
4.2 Peningkatan Kehadiran Militer Tiongkok di Laut Tiongkok Timur-----	32
4.2.1 <i>Chinese Theatre Commando</i> -----	33
4.2.2 <i>Northern and Eastern Theatre Ground Force</i> -----	36
4.2.3 <i>Northern and Eastern Theatre Naval Fleet</i> -----	38
4.2.4 <i>Northern and Eastern Theatre Air Force</i> -----	40
4.2.5 Data Perbandingan <i>Eastern</i> dan <i>Northern Sea Fleet</i> terhadap total angkatan laut Tiongkok -----	42
4.3 Kebijakan Pertahanan Jepang dalam Merespons Kehadiran Militer Tiongkok di Laut Tiongkok Timur-----	43
4.3.1 Kondisi Geografis Batas Teritorial Jepang-----	48
4.3.2 Kapabilitas Militer Jepang-----	50
4.3.3 <i>Japan Ground Self Defense Force</i> -----	52
4.3.4 <i>Japan Navy Self Defense Force</i> -----	54
4.3.5 <i>Japan Air Self Defense Force</i> -----	57
4.3.6 <i>Foreign Military Activity in Japan</i> Teritorial-----	58
4.3.7 Data <i>Japan Maritime Defense Force</i> -----	61
4.3.8 Kondisi Sosial dan Politik jepang -----	63
4.3.9 US-Japan Relation -----	66
4.3.10 Survei Opini Pejabat dan Masyarakat terhadap “ <i>Japan-U.S. Security</i> ” -----	67
4.3.11 Survei Opini Pejabat dan Masyarakat terhadap “ <i>Japan Self Defense Capability</i> ”-----	68
V. PENUTUP -----	70
5.1 Kesimpulan -----	70
5.2 Saran-----	71
DAFTAR PUSTAKA -----	73

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Tabel Penelitian Terdahulu	13
4.1 Tabel Anggaran Belanja Militer 2016—2019	30
4.2.1 Tabel <i>Northern and Eastern Theatre Ground Force</i>	36
4.2.2 Tabel <i>Northern and Eastern Theatre Naval Fleet</i>	38
4.2.3 Tabel <i>Northern and Eastern Theatre Air Force</i>	40
4.3.1 Tabel <i>Japan Ground Self Defense Force</i>	52
4.3.2 Tabel <i>Japan Navy Self Defense Force</i>	54
4.3.3 Tabel <i>Japan Air Self-Defense Force</i>	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Kerangka Pemikiran	24
3.1 Teknik Analisis Data	27
4.2.1 Peta <i>Chinese Theatre Commando</i>	33
4.2.2 Grafik Data Perbandingan <i>Eastern</i> dan <i>Northern Sea Fleet</i> terhadap total angkatan laut Tiongkok	42
4.3.1 Peta Geografis Batas Teritorial Jepang	48
4.3.2 Grafik <i>Military Budget</i> Negara-negara di Kawasan Asia Timur	50
4.3.3 Grafik <i>Number of Foreign Scrambles in Japan Airspace</i>	58
4.3.4 Grafik <i>Chinese Vessels Incursions Japanese Teritorial waters</i>	61
4.3.5 Grafik Survei Opini Pejabat dan Masyarakat terhadap “ <i>Japan –U.S. Security Treaty</i> ”	67
4.3.6 Grafik Survei Opini Pejabat dan Masyarakat terhadap “ <i>Japan Self Defense Capability</i> ”	68

DAFTAR SINGKATAN

AD	: <i>Air Defence</i>
ADIZ	: <i>Air Defense Identification Zone</i>
AEW	: <i>Airborne Early Warning</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nation</i>
AShM	: <i>Anti Ship Missile</i>
ASTT	: <i>Anti Submarin Torpedo Tube</i>
ATLA	: <i>Acquisitio Technology and Logistic Agency</i>
CCG	: <i>China Coast Guard</i>
CMC	: <i>Centra Military Commision</i>
DARPA	: <i>Defense Advance Research Project Agency</i>
EW	: <i>Electronic Warfare</i>
GAD	: <i>General Armament Department</i>
IISS	: <i>The International Institute for strategic studies</i>
IRS	: <i>Intelligence Surveillance and Reconnaissance</i>
JSDF	: <i>Japan Self Defense Force</i>
KTT	: <i>Konferensi Tingkat Tinggi</i>
NIDS	: <i>The National Institute for Defense Studies</i>
PLA	: <i>People of Liberation Army</i>
R&D	: <i>Research and Development</i>
SAM	: <i>Surface to Air Missile</i>
UNCLOS	: <i>United Nation Convention on the Law of the Sea</i>
US	: <i>United States</i>
ZEE	: <i>Zona Ekonomi Eksklusif</i>

I. PENDAHULUAN

Skripsi ini menelaah kebijakan pertahanan yang dilakukan oleh Jepang terhadap peningkatan kehadiran militer Tiongkok di Laut Tiongkok Timur dalam rentang waktu tahun 2016—2019. Penelitian ini penting dan layak untuk dilakukan atas landasan justifikasi teoritis dan empiris, justifikasi metodologis, serta kebaruan yang ditemukan oleh peneliti. Maka dari itu, pada latar belakang penelitian ini, peneliti menyajikan situasi keamanan di Asia timur, sengketa teritorial antara Jepang dan Tiongkok, status khusus konstitusi Jepang, serta justifikasi teoritis dan empiris dengan menggunakan konsep terkait, yaitu konsep kebijakan pertahanan, konsep keamanan tradisional, *Maritime Strategy*. Dalam bab ini pula, peneliti menyajikan, rumusan masalah, tujuan penelitian, serta manfaat penelitian ini.

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan Pertahanan, didefinisikan oleh Hedley Bull (Bull Hedley 1968), adalah suatu seni atau ilmu untuk mendapatkan tujuan di wilayah konflik. Strategi militer berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan mobilisasi *Power* dan mengelabui musuh. Dalam pemahaman Hedley Bull strategi militer lebih mengutamakan tujuan politik dibandingkan militer (Bull Hedley 1968). Kemudian, Menurut Kenneth Waltz dikarenakan negara menggunakan *Force* untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang menyebabkan negara selalu memaksimalkan pertahanan dan keamanannya serta melakukan aliansi dengan negara yang kuat, untuk keamanan dan pertahanannya ketika negara merasa terancam (Waltz 1979a, 123–28). Keamanan merupakan aspek yang vital bagi negara terutama untuk memperjuangkan kedaulatan negara, wilayah, dan rakyat. Oleh karena itu negara harus mampu memenuhi aspek yang mendukung pertahanan negara terutama kapabilitas dalam pertahanan militer negara sehingga ia dapat mempertahankan diri ketika menghadapi kondisi yang mengancam keberlangsungan hidup negara.

Situasi keamanan internasional¹ sedang berada dalam persaingan *United States* (US) dan sekutunya dengan Tiongkok baik secara ekonomi, *power* dan pengaruhnya di dalam dunia internasional. Tiongkok sedang dalam posisi *the rising of power*, bagian terpenting dari keamanan internasional ini ialah usaha pencegahan pengaruh Tiongkok terhadap adidaya US yang menjadi tantangan tersendiri. US harus lebih berfokus secara regional di wilayah sekitar negara Tiongkok tanpa menimbulkan dampak provokasi dengan terus memperdalam aliansi dan kemitraan terutama di wilayah Asia Timur. US sendiri memiliki interest dalam aliansi tersebut untuk menjawab permasalahan atas adanya penurunan pengaruh US di wilayah Asia Timur yang disebabkan dengan adanya *Rising of China* sehingga US bertujuan untuk menjaga status quo dan keseimbangan di wilayah Asia Timur dikarenakan adanya kekhawatiran yang terjadi dari sengketa *maritime* antara Jepang dan Tiongkok dapat menjadikan US tertarik kedalam konflik tersebut (Atanassova-Cornelis dan van der Putten 2014, 27–45).

Sedangkan situasi keamanan di wilayah Asia Timur, negara di Asia Timur sendiri berusaha menjaga keseimbangan hubungan antara US dan Tiongkok, khususnya pada Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Dilihat secara keamanan militer memiliki respons yang mendukung terhadap keterlibatan US secara jangka panjang di kawasan Asia Timur dan digunakan sebagai penyeimbangan atas pengaruh Tiongkok yang terus meningkat (Atanassova-Cornelis dan van der Putten 2014, 69–87). Namun secara khusus bagi Jepang situasi keamanan membawa sebuah dilemma tersendiri dikarenakan sejak Perang Dunia II penggunaan bom atom oleh US menyebabkan Jepang mengumumkan deklarsi penyerahan oleh pihak sekutu sehingga mengalami kekalahan atas sekutu.

Jepang mengalami perubahan kebijakan pertahanan yang disebabkan pendudukan US di Jepang dan aturan Artikel 9 konstitusi Jepang berklausul pelarangan penggunaan sarana perang untuk menyelesaikan perselisihan internasional yang melibatkan negara dan angkatan bersenjata (Darat, Laut dan Udara) yang berpotensi perang tidak diperbolehkan (Imperial Diet 1946, 3)

¹ Keamanan internasional merupakan tindakan yang diambil oleh negara, organisasi internasional seperti Perserikatan bangsa-bangsa maupun Uni Eropa untuk memastikan kelangsungan hidup dan keamanan bersama.

kebijakan internasional Jepang yang berlaku terhadap seluruh negara. Sehingga adanya dilemma aliansi yang dapat merusak stabilitas keamanan Jepang yang rentan dikarenakan sangat bergantung terhadap instrumen militer Amerika sebagai media pertahanan dan keamanan negara serta adanya reinterpretasi kembali terhadap aturan Artikel 9 konstitusi Jepang untuk mendukung stabilitas keamanan Jepang terutama di wilayah Perbatasan. Karena adanya dorongan terhadap permasalahan tersebut menjadikan Jepang membutuhkan perubahan pendekatan dalam permasalahan sengkata dengan Tiongkok dengan melakukan peningkatan kekuatan militer yang tidak sesuai dengan tujuan dari Artikel 9.

Secara aturan teritorial di bawah aturan (United Nation Convention on the Law of the Sea) UNCLOS 1982, negara berhak atas hak berdaulat di wilayah-wilayah laut untuk mengeksplorasi dan memanfaatkan untuk kepentingan ekonomi (United Nations 1982, 43). Secara aturan negara berdaulat memiliki hak atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landasan kontinen beserta sumber daya alamnya. Hak-hak tersebut di berikan kepada negara untuk dapat memanfaatkannya sebagai potensi ekonomi dan memiliki kewenangan untuk menerapkan dan menegakkan hukum nasionalnya di wilayah ini baik untuk aktor domestik maupun internasional.

Namun dalam beberapa kasus daerah perbatasan laut antar negara berbatasan secara langsung dengan negara bagian lain yang selanjutnya dalam beberapa situasi. Wilayah teritorial mengalami tumpang tindih dikarenakan ketidakcukupan wilayah untuk dapat diklaim oleh negara dengan zona maksimum yang diizinkan di bawah aturan UNCLOS delimitasi. Delimitasi dimana pantai dari dua negara yang berlawanan atau berdekatan satu sama lain menyebabkan kedua negara tidak berhak atas wilayah tersebut namun beberapa alasan dapat diberikan dengan keadaan khusus seperti adanya isu sejarah, politik, kebudayaan, dan keamanan (United Nations 1982, 52).

Jepang merupakan negara di kawasan Asia Timur. Jepang dari segi militer, geografis, dengan dibantu keamanan militer US, sebagai negara yang melakukan *Research dan Development* diberbagai bidang teknologi terutama persenjataan militer dibawah pengawasan US, Jepang tetap memiliki pengaruh. Terlebih di

Laut Tiongkok Timur tingkat konflik perbatasan yang sangat tinggi antara Tiongkok dan negara-negara di wilayah Asia Timur terutama Jepang.

Hubungan Jepang di kawasan Asia Timur dari masa setelah Perang Dingin hingga sebelum sengketa pulau perbatasan Senkaku oleh Tiongkok terbilang cukup stabil dan hubungan Jepang dengan negara-negara di wilayah Laut Tiongkok Timur tidak mengalami perubahan yang tinggi. Termasuk juga dengan negara-negara lain yang berada di wilayah Laut Tiongkok Timur (Taiwan dan Korea selatan) juga memiliki relasi yang terbilang stabil dengan Jepang dan Tiongkok.

Perubahan situasi hubungan Jepang dan Tiongkok mulai dirasakan Pada tahun 1972 terjadi perselisihan dengan Tiongkok. Mengenai luas ZEE di Laut Tiongkok Timur dikarenakan penerapan yang berbeda terhadap konvensi Perserikatan bangsa bangsa mengenai hukum laut yang telah diratifikasi kedua negara (United Nations 1970, 53–54). Kemudian pada tahun 1995 Tiongkok berhasil menemukan sumber daya gas alam di bawah Laut Tiongkok Timur dan memulai pembangunan sumber gas alam pada daerah yang sedang disengketakan karena itu Jepang keberatan dengan keputusan Tiongkok.

Permasalahan itu telah memicu banyak hal seperti banyak pertukaran dan pertemuan pejabat tinggi dengan sikap Tiongkok dalam pertemuan KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) tidak dapat dilangsungkan sampai Jepang mengakui bahwa sengketa kedaulatan teritorial laut. Hal ini diperparah dengan hubungan historis pada Perang dunia II masih melekat terhadap warga Asia Timur terutama Tiongkok. Peran Jepang dalam wilayah Laut Tiongkok Timur mempertegas permasalahan di dunia internasional.

Mahan berpendapat terdapat enam elemen *Maritime Strategy* dimana hal itu mendukung kemajuan dan keuntungan negara secara strategis. Berikut enam elemen tersebut

1. Letak geografis.

Letak geografis suatu negara mempengaruhi perkembangan dan keuntungan negara secara strategis tentunya dilihat juga dengan aspek kekuatan

angkatan laut yang dimilikinya. Jepang sebagai negara kepulauan dan tidak memiliki garis batas teritorial dengan negara lain melalui daratan menjadikan laut dan udara sebagai aspek vital bagi negara Jepang dan memberikan keuntungan jika Jepang bisa memanfaatkan lokasinya dengan efektif dan efisien (Milevski 2016).

2. Physical Conformation.

Merupakan perhitungan mengenai jumlah pelabuhan yang dimiliki oleh suatu negara menjadi faktor pendukung untuk negara menjadi lebih kuat. Disisi lain juga dapat menjadi suatu kelemahan bagi negara ketika angkatan laut negara tidak mampu menjaga wilayahnya dengan baik dikarenakan banyaknya jumlah objektif yang harus dilindungi tidak sebanding dengan kemampuan angkatan laut yang tidak memadai (Milevski 2016).

3. Daerah Teritorial Tambahan

Menyatkan luas garis teritorial negara juga merupakan sumber kekuatan suatu negara tetapi kembali lagi luas wilayah dapat menjadi kelemahan saat garis pantai yang dimilikinya tidak dipantau dan dijaga (Milevski 2016).

4. Jumlah Populasi.

Jumlah populasi mempengaruhi perkembangan negara dari jumlah populasi yang tinggi menjadikan jumlah personel kekuatan laut yang dapat di rekrut juga tinggi. Tidak hanya sebatas personil angkatan laut namun juga masyarakat yang bermata pencaharian nelayan yang ikut serta menjaga lautan negara (Milevski 2016).

5. Karakter Nasional.

Karakter masyarakat mencerminkan karakter dari pemerintahan di sebuah negara. Karakter nasional bangsa mempengaruhi pembangunan kekuatan negara baik melalui niaga maupun peningkatan kekuatan angkatan lautnya merupakan pembangun dasar untuk dapat menjadi sebuah negara yang besar (Milevski 2016).

6. *Governmentl Policy*

Kebijakan pemerintah mempengaruhi kekuatan laut negara. Kebijakan pemerintah merupakan hal yang vital tanpa adanya kebijakan yang berfokus maritim maka negara sulit untuk mengembangkan kekuatan lautnya. Kekuatan laut yang dimaksud disini bukan hanya angkatan lautnya saja melainkan juga semua faktor yang terkait dengan kelautan baik dari aspek sipil maupun militer (Milevski 2016).

Karena itu jika dilihat atas perselisihan pulau-pulau kecil di ruang teritori kelautan merupakan permasalahan yang penting dalam geopolitik, namun dalam situasi tertentu persaingan antar negara akan sumber daya alam minyak bumi dapat menjadi sumber awal sengketa wilayah yang di dukung dengan hubungan antar negara yang kurang harmonis menjadikan persaingan yang semakin intensif dalam hal ini antara Tiongkok dan Jepang dalam sumber daya perikanan, gas dan kepualauan di Laut Tiongkok Timur.

Pada tahun 2012 permasalahan hadir dikarenakan klaim Tiongkok terhadap jepang atas kepemilikan Pulau Senkaku yang mempunyai sumberdaya potensial minyak, gas alam dan menjadi wilayah utama bagi pelayar karena area yang kaya akan sumber daya hayati. Sengketa Jepang dan Tiongkok di dalam sengketa Laut Tiongkok Timur didasari dengan adanya estimasi perkiraan Laut Tiongkok Timur yang memiliki cadangan minyak bumi sebanyak 160 Miliar *barrel* termasuk triliunan gas alam. Laut Tiongkok Timur merupakan salah satu wilayah yang belum seberapa terekplorasi dan eksploitasi area sumber daya nya dikarenakan dalam beberapa decade terakhir adanya sengketa klaim teritorial. Palung Okinawa juga diperkirakan kaya akan sumber daya emas, tembaga, seng, nikel, dan perak (Valencia 2014, 185).

Tiongkok sebagai negara importir minyak bersih terbesar kedua di dunia dan menjadi konsumen energi fosil terbesar di dunia sedangkan jepang adalah jaringan terbesar ketiga dalam Importir minyak mentah dan importir gas alam cair terbesar di dunia. Kepentingan nasional kedua negara membuat kertarikan yang tinggi untuk mengekstraksi sumber daya alam dari Laut Tiongkok Timur untuk

membantu memenuhi permintaan. Selama decade terakhir Tiongkok telah melakukan proyek pengeboran minyak lepas pantai di wilayah delimitasi antara Tiongkok dan Jepang menjadikan Jepang memprotes pengeboran dan khawatir akan adanya pertimbangan bahwa Tiongkok telah melakukan tindakan yang melanggar batas wilayah teritorial.

Permasalahan ini terus meningkat dikarenakan wilayah pulau yang tidak berpenghuni dan jauh dari wilayah teritorial utama menyebabkan bentrokan sengketa tidak dapat dihindari dan semakin mengalami peningkatan ketika Tiongkok membangun markas pertahanan udara resmi dan melakukan patrol laut mencakup wilayah udara pulau yang sedang disengketakan menyebabkan setiap penerbangan yang terbang di atas perairan harus mendapatkan izin Tiongkok terlebih dahulu dengan justifikasi pengamanan wilayah teritorial (Johnson 2008, 225).

Letak geografis Jepang yang strategis berada di wilayah Laut Tiongkok Timur dan memiliki tingkat hubungan diplomasi pertahanan dengan US yang ditunjukkan dengan Jumlah *military base* yang dimiliki US di Jepang serta pentingnya wilayah strategis laut atas adanya kehadiran Tiongkok. Menjadikan wilayah Jepang lebih memiliki potensial dibandingkan dengan wilayah lain seperti *South China Sea* dan *Yellow Sea* untuk digunakan dalam melakukan penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Kehadiran Tiongkok yang hampir konstan di zona yang berdekatan terletak antara 12 mil laut dan 24 mil dari wilayah sengketa Pulau Senkaku, mengundang ketidaknyamanan dan mengancam Jepang dengan adanya perluasan patroli kapal angkatan laut Tiongkok yang dalam operasinya terus berada di sekitar wilayah kepulauan Senkaku Jepang termasuk dengan jenis kapal bertipe *fregate* yang menjadikan adanya peningkatan terhadap penggunaan kapal laut kombatan. Selain itu juga ditemukan adanya aktifitas kapal selam Tiongkok di wilayah teritorial Jepang peningkatan aktifitas ini bukan hanya dilakukan dalam elemen *maritime* tetapi juga melalui *aerospace* dengan adanya penggunaan pesawat jenis *Fighter*

melakukan patrol di wilayah Laut Tiongkok Timur namun melewati batas teritorial Jepang (Japan Ministry of Defense 2021).

Permasalahan tersebut membuat Jepang dibawah kepemimpinan Shinzo Abe mengumumkan rencana peningkatan militer, yang menyebabkan munculnya isu di internasional mengenai “*Japan Re-Armed*” dikarenakan Jepang selama ini memiliki kondisi militer yang khusus dibandingkan negara lain yang disebabkan kekalahannya pada Perang Dunia II menyebabkan Jepang mengalami Disarmament dan pembatasan Militer Jepang untuk membangun atau menggunakan militer untuk digunakan secara offensive atau mencapai tujuannya yang terdapat pada *Article 9* (Ministry of Defense Japan 2023). Oleh karena itu, Berdasarkan latar belakang ini, maka penelitian ini penting untuk menelaah bagaimana peningkatan aktivitas militer yang dilakukan oleh Tiongkok pada Laut Tiongkok Timur dan Bagaimana Kebijakan militer Jepang dalam menghadapi hal tersebut, dengan pertanyaan penelitian :

“Bagaimana kebijakan pertahanan Jepang terhadap peningkatan kehadiran militer Tiongkok di Laut Tiongkok Timur Periode 2016—2019?”

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan, yakni :

1. Mendeskripsikan peningkatan kehadiran militer Tiongkok di Laut Tiongkok Timur; dan
2. Mendeskripsikan kebijakan pertahanan Jepang terhadap peningkatan kehadiran militer Tiongkok di Laut Tiongkok Timur dari tahun 2016 hingga 2019

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari proposal penelitian ini adalah :

1. Akademis

Secara akademis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu Hubungan Internasional khususnya kajian isu tradisional seperti *defense policy* Jepang. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan penelitian atau referensi untuk pengambilan kebijakan atau strategi militer negara

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan tinjauan pustaka yang terbagi dalam tiga bagian. Bagian pertama penelitian terdahulu dilakukan dalam langkah untuk menemukan sumber literatur terkait kelangsungan penelitian sebelumnya dan memberikan referensi bagi peneliti terhadap kebaruan penelitian, pada bagian kedua menguraikan landasan konseptual yang terdiri dari konsep *defense ownership*, *national capability*, *ally reliability*, *foreign military presence*, *arms dynamic*, *balance of power*, *deterrence*, *maritime strategy*, kapabilitas militer, serta *offense defense theory*, pada bagian ketiga dipaparkan kerangka pemikiran yang bertujuan untuk memberikan alur pikir yang diterapkan dalam penelitian ini serta memberikan gambaran mengenai kebijakan pertahanan Jepang terhadap peningkatan kehadiran Tiongkok di Laut Tiongkok Timur dari periode tahun 2016 hingga 2019.

2.1 Penelitian Terdahulu

Tema penelitian yang membahas sama dengan Strategi Jepang terhadap kehadiran Tiongkok di Laut Tiongkok Timur sebelumnya telah dilakukan oleh penelitian **pertama** ditulis oleh Adam P.Liff, seorang Peneliti di *East Asian International Relations* di *India University's*, juga seorang *Founding Director 21st Century Japan Politics and Society Initiative*. Penelitian Adam berjudul “*China, Japan, and The East China Sea : Beijing Gray Zone Coercion and Tokyo Response*”. Dalam tulisan tersebut, Adam memfokuskan penelitian pada Penggunaan “*Gray zone*” terhadap persaingan antara Tiongkok dan Jepang di Laut Tiongkok Timur sebagai alasan bagi kedua negara untuk menegaskan klaim kedaulatannya di area Laut Tiongkok Timur.

Dalam Penelitian ini, Adam fokus pada *gray zone* yang merupakan penggunaan *paramilitary coast guard* Tiongkok dibandingkan dengan penggunaan

Militer angkatan laut untuk dapat mengeksploitasi *US-Japan Mutual Security Treaty* yang menegaskan kerjasama keamanan dalam merespons serangan bersenjata terhadap salah satu pihak di wilayah administrasi Jepang (Liff 2019, 8). Klaim teritorial oleh Tiongkok menjadi alasan untuk Jepang khawatir. Operasi kapal non-militer patrol laut oleh Tiongkok yang provokatif di wilayah perairan Laut Tiongkok Timur menjadikan fokus keamanan geopolitik dengan kondisi *gray zone* di wilayah Asia Timur bersifat korosif terhadap ketertiban dan keamanan wilayah laut (Liff 2019, 3). Berbeda dengan penelitian Adam P Liff yang berfokus terhadap penggunaan *gray zone* di wilayah Laut Tiongkok Timur, Penelitian penulis berfokus terhadap Strategi pertahanan Jepang di wilayah Laut Tiongkok Timur dan bagaimana kehadiran militer Tiongkok mempengaruhi keamanan maritim Jepang.

Penelitian **kedua** mengenai Strategi Jepang terhadap kehadiran Tiongkok di Laut Tiongkok Timur ditulis dalam jurnal "*China Japan and Maritime Order in the East China Sea*" oleh James Manicom, seorang peneliti di *Global Security and Politics Program at International Governance Innovation in Waterloo*. Dalam penelitian ini James berfokus terhadap sengketa dan kerjasama yang terjadi didalam tantangan krisis teritorial antara Tiongkok dan Jepang didalam aspek kedaulatan atas pulau, wilayah laut nelayan, survey maritim dan pengembangan sumber daya (Manicom 2014, 199–203). James berpendapat upaya penurunan intensitas ketegangan di wilayah Laut Tiongkok Timur tidak hanya upaya yang berbentuk menggunakan infrastruktur militer namun juga melalui kerjasama di beberapa bidang meskipun bersifat tidak efektif dan rentan mengalami kegagalan atau pecahnya kembali ketegangan antar kedua negara. Berbeda dengan penelitian James yang berfokus terhadap rekam jejak kerjasama antara Tiongkok dan Jepang dalam mengatasi ketegangan sengketa di wilayah Laut Tiongkok Timur, penelitian ini berfokus terhadap penggunaan strategi pertahanan Jepang dan kaitannya dengan artikel 9 Jepang.

Penelitian **ketiga** dengan jurnal berjudul "*Confronting China's Maritime Expansion in the South China Sea*" ditulis oleh Dr. Stephen Burgess seorang Professor di *US Air War College*, dalam jurnal ini, Stephen berpendapat aksi kolektif mencegah US dan sekutu untuk dapat secara efektif menghadapi Tiongkok

di Laut Tiongkok Selatan, US memiliki kemampuan untuk dapat menyediakan infrastruktur militer bagi ASEAN untuk menghentikan klaim Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan namun secara realitas tindakan yang dilakukan oleh US hanya terus melakukan latihan bersama militer dengan ASEAN yang tidak membuat dampak apapun serta hanya menghadirkan aktifitas militer Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan terus meningkat menjadikan Keamanan teritorial laut terancam. Secara keseluruhan jurnal ini adalah, (1) Mendeskripsikan dan mengalasi Aksi kolektif US yang kurang efektif untuk mempengaruhi keamanan di kawasan Laut Tiongkok Selatan terhadap pengaruh Tiongkok, (2) Lemahnya ASEAN tanpa bantuan infrastruktur militer dari US untuk dapat menghadapi ancaman Tiongkok di laut Tiongkok Selatan (Burgess 2020, 129–30).

Penelitian ini memberikan pandangan mengenai peran US dalam mengatasi ekspansi militer Tiongkok di Laut Tiongkok Selatan, bagaimana aksi kolektif US yang kurang efektif bagi negara-negara di kawasan ini dalam membendung ekspansi militer Tiongkok. Berbeda dengan penelitian Stephen, Penulis tidak berfokus terhadap Aliansi Japan-US dalam menjaga kamanan negara-negara Laut Baltik. Tetapi, penulis berfokus dalam peran aliansi dalam menjaga stabilitas keamanan di wilayah Laut Tiongkok Timur.

Penelitian **keempat** jurnal berjudul “*The Senkakus (Diaoyu/Diayutai) Dispute US Treaty Obligation*” yang diterbitkan oleh *Congressional Research Service* (Manyin 2021) Mark E. Manyin *Spesialis in Asian Affairs*, merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan tema utama sengketa kedaulatan Pulau Senkaku dengan pembahasan secara historis 1971 *Okinawa Reversion Treaty* hingga 2021 *US support*. Dalam jurnal ini membahas mengenai konflik sengketa yang terus terjadi antara Tiongkok dan Jepang menjadikan Peningkatan fokus keterlibatan US terutama adanya resiko dalam konflik bersenjata atas sengketa Pulau Senkaku. Pulau Senkaku dipercayai oleh beberapa geologis memiliki jumlah cadangan gas alami dan minyak yang cukup signifikan (Manyin 2021, 1–3). Namun juga secara geografis letak pulau tersebut sangat strategis berada diantara tiga administratif wilayah yaitu Taiwan, Tiongkok dan Jepang.

Berbeda dengan penelitian Mark yang berfokus terhadap sengketa Pulau Senkaku dan dukungan US terhadap Jepang atas Klaim Tiongkok terhadap sengketa pulau tersebut, penulis tidak hanya memfokuskan penelitian ini terhadap sengketa Pulau Senkaku, namun pada akumulasi sengketa permasalahan yang terjadi antara Jepang dan Tiongkok di Laut Tiongkok Timur serta Bagaimana Jepang melakukan Strategi Pertahanannya.

Tabel Penelitian Terdahulu

Judul Penelitian	Penulis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
<i>China, Japan, and The East China Sea : Beijing Gray Zone Coercion and Tokyo Response</i>	Adam P. Liff (2019)	Berdasarkan penelitian ini, Klaim China terhadap wilayah teritorial <i>East China Sea</i> dengan menggunakan <i>Grey Zone</i> bertujuan untuk tetap berada di bawah ambang batas serangan bersenjata dengan pasukan non militer dan secara bersamaan mengeksploitasi US-Japan Treaty dan membatasi Jepang dalam upaya merespon secara efektif namun demikian menurut Adam transformasi keseimbangan kekuatan di wilayah <i>East China Sea</i> akan terus berkembang dan menjadi titik potensial utama fokus keamanan antara China dan Jepang	Dalam penelitian ini penulis berfokus terhadap Strategi pertahanan Jepang di wilayah East China Sea dan bagaimana kehadiran Militer China mempengaruhi keamanan maritim Jepang.
<i>China Japan and Maritime Order in the East China Sea</i>	James Manicom (2014)	Berdasarkan penelitian ini, Berfokus terhadap Sengketa dan Kerjasama yang terjadi didalam tantangan krisis teritorial antara China dan Jepang didalam aspek Kedaulatan atas pulau, Wilayah laut nelayan, Survey maritim dan Pengembangan sumber daya. James berpendapat upaya penurunan intensitas ketegangan di wilayah East China Sea tidak hanya upaya yang berbentuk menggunakan Infrastruktur militer namun juga melalui kerjasama di beberapa bidang meskipun bersifat tidak efektif dan rentan mengalami kegagalan atau pecahnya kembali ketegangan antar kedua negara.	Penelitian penulis akan berfokus terhadap Strategi Pertahanan Jepang dan kaitannya dengan Article 9 Jepang

Judul Penelitian	Penulis	Hasil Penelitian	Perbedaan Penelitian
<i>Confronting China's Maritime Expansion in the South China Sea</i>	Dr. Stephen Burgess (2020)	Berdasarkan penelitian ini dikatakan aksi kolektif mencegah US dan sekutu untuk dapat secara efektif menghadapi China di laut China selatan, US memiliki kemampuan untuk dapat menyediakan infrastruktur militer bagi ASEAN untuk menghentikan klaim China di Laut China selatan namun secara realitas tindakan yang dilakukan oleh US hanya terus melakukan latihan bersama militer dengan ASEAN yang tidak membuat dampak apapun serta hanya menghadirkan aktifitas militer China di Laut China Selatan terus meningkat menjadikan Keamanan territorial laut terancam. Secara keseluruhan jurnal ini adalah, (1) Mendeskripsikan dan mengalasi Aksi kolektif US yang kurang efektif untuk mempengaruhi keamanan di kawasan Laut China Selatan terhadap pengaruh China, (2) Lemahnya Asean tanpa bantuan Infrastruktur militer dari US untuk dapat menghadapi ancaman China di laut China Selatan.	Dalam penelitian ini penulis tidak hanya berfokus pada peran Aliansi dalam hal ini Japan-US dalam menjaga keamanan East China Sea tetapi juga bagaimana Japan mengatasi kehadiran militer China sebagai sebuah negara. Meskipun begitu, penulis tidak mengesampingkan peran Aliansi dalam menjaga status keamanan di wilayah East China Sea.
<i>the Senkakus (Diaoyu/Diaoyutai) Dispute US Treaty Obligation</i>	Mark E. Manyin (2021)	Berdasarkan penelitian ini membahas sengketa Kedaulatan Pulau Senkaku/Diaoyu dengan pembahasan secara Historical 1971 Okinawa Reversion treaty hingga 2021 US Support. Dalam jurnal ini membahas mengenai konflik sengketa yang terus terjadi antara China dan Jepang menjadikan Peningkatan fokus keterlibatan US terutama adanya resiko dalam konflik bersenjata atas sengketa Pulau Senkaku/Diaoyu. Pulau Senakku/Dioyu dipercayai oleh beberapa geologis memiliki jumlah cadangan Gas alami dan minyak yang cukup signifikan. Namun juga secara geografis letak pulau tersebut sangat strategis berada diantara tiga administratif wilayah yaitu Taiwan, China dan Jepang.	Penelitian ini penulis tidak hanya memfokuskan penelitian ini terhadap sengketa pulau Senkaku/Diaoyu, namun pada akumulasi sengketa permasalahan yang terjadi antara Jepang dan China di Laut China Timur serta Bagaimana Jepang melakukan Strategi Pertahanannya.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 *Defence Ownership*

Kebijakan pertahanan merupakan suatu program atau rencana dengan tindakan yang diambil oleh sebuah negara untuk melakukan perlindungan keamanan negara dari ancaman militer negara lain baik dimanasa perang maupun masa damai. Kekuatan militer menurut ahli Leif-eric Easley, merupakan komponen utama penunjang pertahanan negara. kapabilitas militer suatu negara merupakan fokus utama bagi suatu negara dalam kebijakan pertahanan negara. Negara menetapkan kebijakan pertahanan dalam menjaga keamanan nasionalnya. Hal tersebut sesuai berdasarkan konsep *defense ownership* bahwa pentingnya aset militer secara fisik dalam mendorong keamanan nasional dan kepentingan nasional dengan memodernisasi perlengkapan serta pengembangan kemampuan personel militernya untuk peningkatan pertahanannya disertai peningkatan anggaran pertahanan negara. Beberapa faktor dalam konsep *defense ownership*, ialah: *external threat*, *national capabilities*, dan *ally reliability* (Easley 2007, 156).

2.2.1.1 *External Threat*

Dalam keamanan internasional yang bersifat anarki, lingkungan internasional dapat menjadi sumber ancaman, perspektif negara terhadap negara disekitarnya dapat menimbulkan adanya aksi-reaksi yang dinilai merupakan sebuah gangguan terhadap keamanan negara tersebut. pada dasarnya ancaman suatu negara memang bisa datang dari dalam maupun luar, namun secara umum ancaman yang terjadi berasal dari luar negara, dalam konsep keamanan militer tradisional ancaman yang muncul selalu bersifat militer menjadikan pendekatan yang dilakukan juga bersifat militeristik (Easley 2007, 156).

Berdasarkan mersheimer, Negara akan lebih mengutamakan potensi *offensive capabilities* dari negara di sekitar wilayah lingkungan negaranya dan mengukur negara mana yang memiliki potensi sebagai ancaman bagi keberlangsungan negara dan merespons atas setiap kegiatan yang dilakukan oleh negara tersebut. hal ini didasri oleh dengan fakta bahwa setiap negara memiliki kapabilitas militer yang dapat

digunakan secara *offensive* dan fakta bahwa suatu negara tidak dapat menentukan secara pasti mengenai maksud dan tujuan dari aktivitas militer dari negara lain (Mearsheimer 1994, 30).

2.2.1.2 *National Capability*

Kapabilitas suatu negara sangat mempengaruhi perkembangan dan bagaimana negara menggunakan kekuatan untuk pertahanannya. Tingkatan pendapatan negara menjadi penunjang utama dalam menjalankan kebijakan pertahanan berdasarkan anggaran militer yang diberikan untuk bersiap menghadapi ancaman yang berasal dari lingkungan internasional.

Letak geografis negara mempengaruhi kapabilitas nasional serta orientasi kekuatan militer pada suatu negara yang didukung bentuk politik luar negerinya. Berdasarkan posisi geografis, terdapat negara yang berada pada wilayah yang sangat terancam dan disisi lain terdapat negara yang memiliki wilayah geografis yang strategi dan mendukung untuk mendorong kebijakan pertahanan negara. Di dalam sistem internasional yang bersifat anarki, negara akan melakukan peningkatan *power* untuk dapat *survive* dan mempertahankan kepentingan nasional terhadap ancaman negara lain dan membentuk kebijakan pertahanan negara berdasarkan *force posture* negara.

2.2.1.3 *Ally Reliability*

Menurut Easley, negara membutuhkan jaminan terhadap keamanan negaranya, ketika beberapa negara memiliki kesamaan kepentingan keamanan negara dan *interest*, negara tersebut dapat melakukan kerjasama untuk menjamin keamanan negara di dalam kondisi tersebut. didukung pendapat James D. Morrow, aliansi terbentuk berdasarkan persamaan interest antar negara. Negara-negara akan membentuk atau bergabung kedalam aliansi jika hal tersebut menguntungkan bagi negaranya (Easley 2007, 157).

ally reliability berupaya untuk mencapai keseimbangan antara kapabilitas militer dengan pertahanan nasional. Dalam menghadapi ancaman negara memiliki tiga opsi dalam melakukan respons yaitu, Negara dapat meningkatkan kapabilitasnya (*Internal Balancing*), Negara-negara bergabung dalam merespons ancaman (*External Balancing*), atau negara bergabung dengan sumber ancaman itu sendiri (*Bandwagoning*). Berdasarkan Realis structural defensive negara-negara akan melakukan penyeimbangan diri menyesuaikan terhadap ancaman yang ada dalam hal ini disebut juga dengan *Balance of Threat*. Menurut Waltz negara-negara akan bergabung dan berkerjasama untuk melindungi diri mereka sendiri dan wilayah teritorialnya terhadap ancaman yang terjadi (Stephen M. Walt 1987, 17).

2.2.2 *Foreign Military Presence*

Kehadiran militer merupakan suatu fenomena dimana personil dan aset militer ditempatkan pada wilayah tertentu yang bertujuan untuk mendukung atau menjalankan kepentingan negara di wilayah tersebut dengan melakukan berbagai aktivitas seperti patroli wilayah maupun operasi militer strategis. Kemudian, secara pragmatis pemahaman *foreign military presence* merupakan suatu praktik dimana suatu negara dapat melakukan aktifitas militer dalam jangka waktu panjang di dalam wilayah kedaulatan negara lain. Kehadiran dalam jangka panjang ini dapat bersifat secara sementara atau terikat atas suatu keadaan khusus (Schmidt 2014, 817–18).

2.2.3 *Arms Dynamic*

Didalam sistem internasional kekuatan persenjataan digunakan oleh negara untuk mendukung kepentingan politik, *arms dynamic* merupakan suatu rangkaian dorongan akan suatu negara untuk mempunyai instrument persenjataan dengan tujuan untuk memodernisasi dan menambah jumlah persenjataan yang dimiliki oleh negara. Dalam kondisi tertentu *arms dynamic* dapat tereskalasi menjadi *arms race* ketika antar negara berusaha meningkatkan upaya pertahanannya berbanding lurus dengan adanya peningkatan atas potensi ancaman yang dihasilkan dari upaya

peningkatan instrument militer terhadap negara lain namun hal ini juga dipengaruhi atas kondisi geografis dan kondisi negara tersebut (Buzan 1987, 73). Terdapat tiga model untuk menganalisis secara lebih lanjut,

2.2.3.1 *Action-Reaction Model*

Secara mendasar negara memperkuat aset militernya dikarenakan adanya potensi ancaman yang berasal dari negara lain, usaha suatu negara dalam upaya meningkatkan instrument militernya berbanding lurus dengan adanya peningkatan atas potensi ancaman terhadap negara lain yang kemudian, bereaksi dengan upaya peningkatan aset militernya juga. Namun upaya peningkatan ini bukan hanya itu kepentingan keamanan saja tetapi juga dapat digunakan untuk mendukung tercapainya kepentingan nasional. Terdapat tiga variabel dalam model *action-reaction*. Pertama, *magnitude* merupakan bagaimana bentuk respons negara atas adanya peningkatan militer tersebut, kedua *timing* melihat frekuensi tingkatan negara dalam merespons aksi suatu negara, ketiga *awareness* apakah adanya kesadaran negara atas proses *arms dynamic* yang terjadi dan apakah negara berusaha memanfaatkan proses tersebut (Buzan 1987, 76–90).

2.2.3.2 *Domestic Structure Model*

Di dalam upaya peningkatan aset militer apakah negara dipengaruhi oleh politik dalam negeri, tingkatan ekonomi negara dan adanya pengaruh sejarah yang mendorong negara dalam melakukan respons terhadap *arms dynamic* (Buzan 1987, 94–95).

2.2.3.3 *Technological Imperative Model*

Model ini digunakan untuk menganalisis adanya peningkatan kualitas persenjataan secara keseluruhan, perbedaan kemajuan teknologi yang diterapkan terhadap instrument militer dapat mempengaruhi kualitas persenjataan tersebut dalam beroperasi, ketika negara berupaya dalam meningkatkan instrument berarti peningkatan

tersebut bukan hanya dalam hal kuantitas tetapi juga kualitas (Buzan 1987, 105–8).

2.2.4 *Security Dilemma*

Konsep ini digunakan untuk menggambarkan apa yang terjadi dengan Jepang dalam peningkatan kehadiran militer Tiongkok di Laut Tiongkok Timur. Security dilemma merupakan keadaan dimana negara merasa khawatir akan potensi militer yang dimiliki oleh negara lain khususnya negara yang berada dalam satu wilayah regional dan berbatasan langsung. Keadaan tersebut menyebabkan negara dapat mengalami krisis keamanan atas potensi ancaman yang ada dan ikut dalam melakukan peningkatan kapabilitas militer untuk menjaga keamanan nasional negaranya (Jervis 1978, 167–214). Situasi ini dapat dilihat dalam sikap negara Jepang yang berusaha meningkatkan kapabilitas militer negaranya meskipun hal tersebut tidak sesuai dengan konstitusi nasionalnya.

2.2.5 *Balance of Power*

Balance of power atau penyeimbangan kekuasaan atau kekuatan dimana negara berusaha mencegah potensi ancaman dengan melakukan penyeimbangan *power* dengan aktor ancaman tersebut demi tercapainya rasa aman dari ancaman. Hal ini memiliki dua upaya baik secara internal maupun eksternal. Upaya internal negara dapat melakukan penyeimbangan *power* dengan melakukan peningkatan kemampuan ekonomi, mengembangkan strategi pertahanan dan meningkatkan kapabilitas militernya sedangkan eksternal dilakukan dengan melakukan penyeimbangan melalui pembentukan aliansi atau sekutu (Waltz 1979b, 118).

2.2.6 *Deterrence*

Deterrence merupakan sebuah usaha yang dilakukan untuk mencegah atau menghentikan hal yang tidak diharapkan. Konsep terdiri dari pencegahan (*Denial*) dan aksi pembalasan (*Retaliation*). Konsep

deterrence kerap kali digunakan dalam permasalahan ancaman militer. *Deterrence* berusaha menghalau aktor lain yang diperkirakan menjadi ancaman bagi keamanan dengan respons memberikan rasa takut kepada pihak lawan. Menjadikan bentuk pertahanan ini terjadi sebelum datangnya sebuah serangan lawan (Buzan 1987, 136–42). Konsep ini digunakan untuk melihat respons Jepang melalui kebijakan pertahanannya dalam merespons keamanan negara atas Tiongkok.

2.2.7 *Maritime Strategy*

Menurut Alfred Thayer Mahan berpendapat bahwa ada enam elemen *Maritime Strategy* diantaranya Posisi Geografis, bagaimana posisi geografis suatu negara akan sangat menentukan keuntungan strategis negara apakah ia memberikan keuntungan atau tidak. Jepang dengan negara kepulauan di kawasan Asia Timur menjadikan Jepang tidak memiliki perbatasan dengan negara lain secara daratan namun di pisahkan oleh lautan yang menjadikan wilayah laut sangat vital bagi pertahanan negara. Selain itu juga terdapat Teritorial tambahan yang mengatakan kalau luas garis pantai negara merupakan kekuatan suatu negara yang menjadikan suatu hal yang wajar untuk negara saling berebut wilayah kekuasaan apalagi dalam kasus ini adanya perselisihan sengketa teritorial antara Jepang dan Tiongkok, seperti pendapat Geoffrey Till menguasai laut berarti negara dapat menggunakannya untuk tujuan negara itu sendiri (Perdagangan, Penangkapan Ikan, Ekstraksi sumberdaya mineral dan mencegah musuh untuk memanfaatkan laut) (Milevski 2016, 31).

2.2.8 *Offense Defense Theory*

Dalam penelitian ini peneliti memakai teori *offense defense* berdasarkan Stephen Van Evera. Teori ini juga berdasarkan dari Robert Jervis yaitu konsep *security dilemma* yang menyatakan security dilemma merupakan keadaan dimana negara merasa khawatir akan potensi militer yang dimiliki oleh negara lain khususnya negara yang

berada dalam satu wilayah regional dan berbatasan langsung. Keadaan tersebut menyebabkan negara dapat mengalami krisis keamanan atas potensi ancaman yang ada dan ikut dalam melakukan peningkatan kapabilitas militer untuk menjaga keamanan nasional negaranya (Jervis 1978, 167–214).

Dalam *Offense Defense Theory* menyatakan bahwasanya jika *offense* mengungguli maka menghasilkan adanya peningkatan atas *security dilemma* yang dilanjutkan oleh *arms race* hingga akhirnya menyebabkan perang. Oleh karena itu perang dapat dicegah jika *defense* lebih mengungguli daripada *offense*. Dalam *Offense Defense Theory* ada sepuluh penyebab perang di daerah kawasan. 1. Kondisi jika negara mudah untuk dikuasai sehingga memicu adanya usaha ekspansi. 2. Negara terdorong semakin *insecure* atas keamanannya sehingga mendorong negara untuk mempertahankan diri dengan cara *defensive*, 3. Rasa ketidakamanan mendorong negara untuk melakukan pencegahan atas peningkatan kekuatan negara lain. 4. Adanya kesempatan untuk negara melakukan penyerangan awal, 5. Ketidakamanan mendorong terjadinya *preventif war*. 6. Negara lebih sering melakukan strategi yang memicu perang, 7. Terjadinya tindakan Non-kooperatif oleh negara negara sehingga sulit dilakukannya negosiasi atau penyelesaian sengketa. 8. Negara menggunakan kerahasiaan yang tinggi atas kebijakan luar negeri dan pertahanan, 9. Terjadinya *arms race* yang begitu pesat sehingga sulit untuk dikontrol, 10. Kondisi negara yang mempermudah untuk melakukan *conquest* atas negara lain.(Evera 1984, 6)

2.2.9 Kapabilitas Militer

Berdasarkan *department of defence* US kapabilitas militer merupakan kemampuan untuk mencapai objektif perang (untuk memenangkan pertempuran, perang, menghancurkan target operasi, dll.) yang terbagi menjadi empat bagian yaitu *readiness* kemampuan untuk melakukan penerjunan operasi tanpa hambatan, *sustainability*

kemampuan untuk memberikan dukungan logistik dan perlengkapan. *modernization* kemajuan system perlengkapan dan persenjataan yang dimiliki, *force structure* jumlah unit dan personel yang dimiliki (Department of Defense United States of America 1985) atau secara spesifik dibagi menjadi *defence spending*², *armed forces*³, *weapon and platforms*⁴, dan *signature capabilities*⁵ (Lowy Institute 2023).

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan gambaran yang jelas dengan menghubungkan beberapa variabel menjadi satu makna yang jelas mengenai implikasi suatu penelitian dari perumusan masalah hingga pengambilan kesimpulan. Penelitian ini dengan judul “Kebijakan Pertahanan Jepang terhadap Peningkatan Kehadiran Militer Tiongkok di Laut Tiongkok Timur Periode 2016—2019. Diawali dari permasalahan ketika Tiongkok *military expansion* di Laut Tiongkok Timur mulai mendapatkan perhatian dari dunia internasional dan memunculkan kekhawatiran bagi Negara-negara di wilayah Laut Tiongkok Timur, dengan respons Jepang melakukan protes atas klaim teritorial laut atas wilayah perbatasan Jepang yang di lanjutkan dengan adanya aktifitas angkatan militer Tiongkok yang melakukan pelanggaran perbatasan Jepang dalam tingkatan frekuensi yang tinggi. Menjadikan Jepang berupaya untuk merespons adanya kegiatan *terraspassing* oleh angkatan militer Tiongkok dengan menggunakan kebijakan pertahanan berdasarkan *Article 9*. Oleh karena itu pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam skripsi ini, yaitu terkait Kebijakan Pertahanan Jepang berdasarkan Aturan Artikel 9 dan Militer Tiongkok di Laut Tiongkok Timur dengan menggunakan alat analisis berupa *offense defense theory* serta konsep *Defense Ownership*, dengan unit analisis pendukung *External Threat*, *National Capability*, dan *Ally Reliance*.

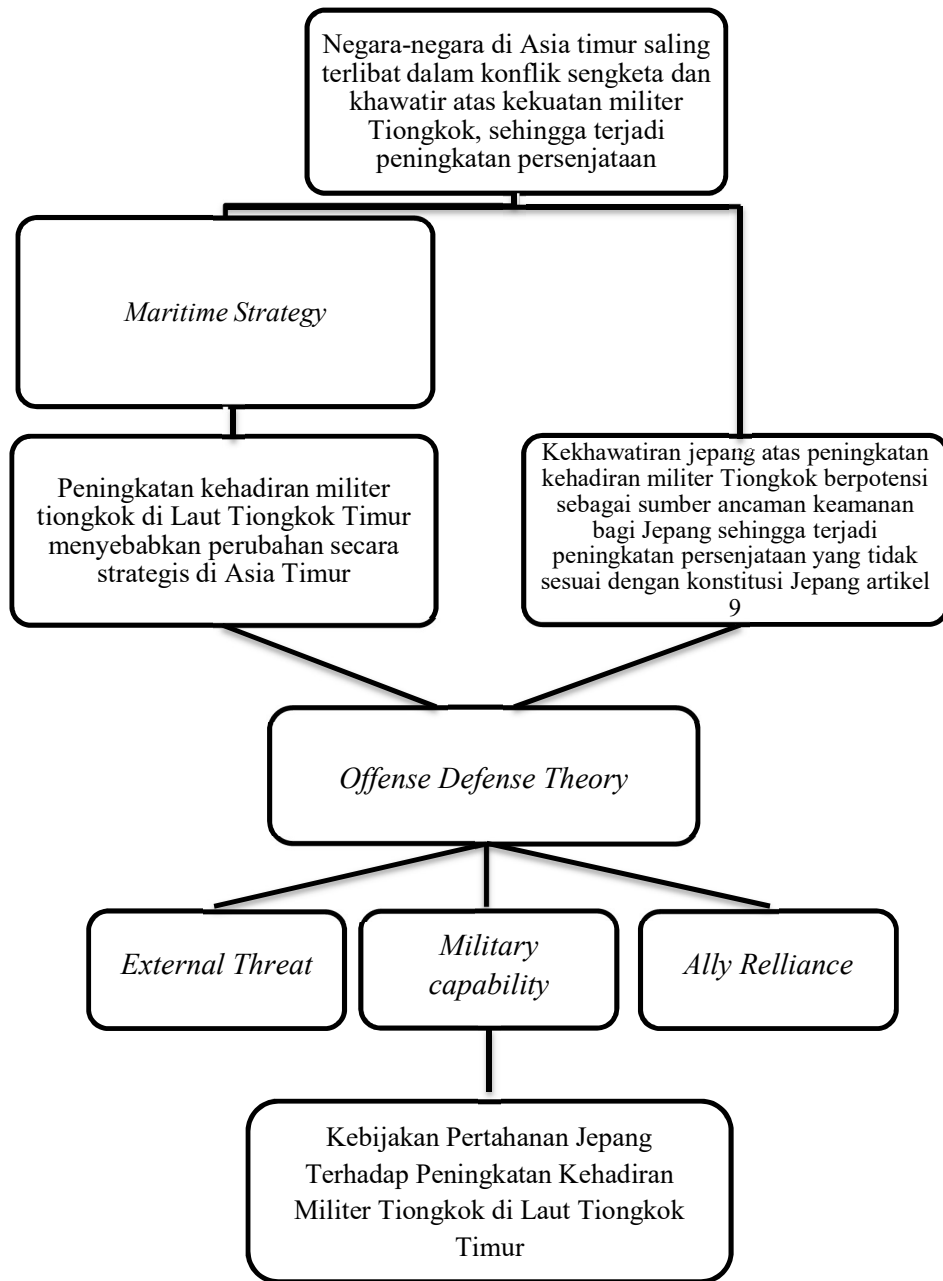
² Anggaran militer tahunan yang digunakan untuk pemeliharaan, pembaruan, penggantian dan pengembangan militer.

³ Total aktif personel militer dan jenis unitnya

⁴ Jenis asset militer darat, laut dan udara

⁵ Kapabilitas yang penting untuk mendukung dalam peperangan

Pertama, *Offense defense theory* digunakan untuk mengeksplorasi kegiatan pembangunan kebijakan pertahanan untuk mendeskripsikan kegiatan Pertahanan dan Keamanan Jepang. **Kedua**, dengan variabel pembangun *External Threat, Military Capability, dan Ally Reliance* digunakan untuk mendeskripsikan pembangunan kebijakan pertahanan Jepang. Adapun kedua poin ini merupakan sebuah instrument untuk mendukung tujuan penelitian dalam rangka mendeskripsikan **“Bagaimana Kebijakan Pertahanan Jepang Terhadap Peningkatan Kehadiran Militer Tiongkok di Laut Tiongkok Timur Periode 2016—2019”** Berikut bagan kerangka pemikiran ini ;



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

III.METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menyediakan penjelasan metodologis yang digunakan oleh peneliti. Bab ini terbagi ke dalam lima bagian, yaitu: jenis penelitian, fokus penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif, dengan fokus penelitian yaitu pada Kebijakan Pertahanan Jepang Terhadap Peningkatan Kehadiran Militer Tiongkok di Laut Tiongkok Timur pada tahun 2016—2019. Sumber data yang dijadikan acuan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah sumber-sumber sekunder. Data dan fakta dikumpulkan dengan teknik studi literatur yang dianalisis untuk kemudian disajikan dan ditarik kesimpulannya berdasarkan data yang diperoleh.

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendeskripsian dan analisis mengenai fenomena, aktifitas sosial, peristiwa, kepercayaan, sikap, persepsi, dan hasil pemikiran individu maupun kelompok. Jenis penelitian ini dipilih karena dianggap dapat mendukung penelitian dalam melakukan perinterpretasian mengenai peningkatan kehadiran militer Tiongkok di Laut Tiongkok Timur terhadap kebijakan pertahanan Jepang. Kemudian, data dari berbagai sumber yang diperoleh oleh penelitian baik dalam bentuk numerik dilakukan pengolahan data oleh peneliti dengan memperkaya dan diperdalam melalui analisis dengan objektifitas argumen peneliti yang menentukan mengenai keabsahan penelitian.

3.2 Fokus Penelitian

Penelitian ini membuat batasan cakupan ruang penelitian yang didasar untuk membantu peneliti agar tidak meluas dari pembahasan yang seharusnya

dengan menentukan fokus penelitian pada skripsi ini. Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana kebijakan pertahanan yang dilakukan oleh Jepang terhadap peningkatan aktifitas militer Tiongkok di Laut Tiongkok Timur dalam periode tahun 2016—2019. Penetapan batasan penelitian pada tahun 2016—2019 disebabkan peningkatan kehadiran militer Tiongkok di Laut Tiongkok Timur yang intensitasnya semakin tinggi berbanding lurus terhadap jumlah pelanggaran perbatasan Jepang oleh Tiongkok dengan difokuskan terhadap pemerintahan Perdana menteri Shinzo Abe serta periode tersebut tepat setelah revisi terhadap Artikel 9 konstitusi Jepang yaitu 2015 sedangkan maksimal tahun 2019 disebabkan pada tahun 2020 fokus keamanan secara global sedang mengutamakan terhadap ancaman dari virus Covid-19. Kemudian, peran aliansi Jepang-US berperan penting dalam penelitian ini dikarenakan berdasarkan *US-Japan Security Treaty* merupakan perjanjian yang mengizinkan US untuk memiliki pangkalan militer di Jepang dan mewajibkan kedua negara untuk saling mempertahankan diri jika salah satu diserang. Meskipun begitu tidak menutup adanya penggunaan data di luar jangka waktu yang ditetapkan untuk mendukung penelitian.

3.3 Jenis dan Sumber Data

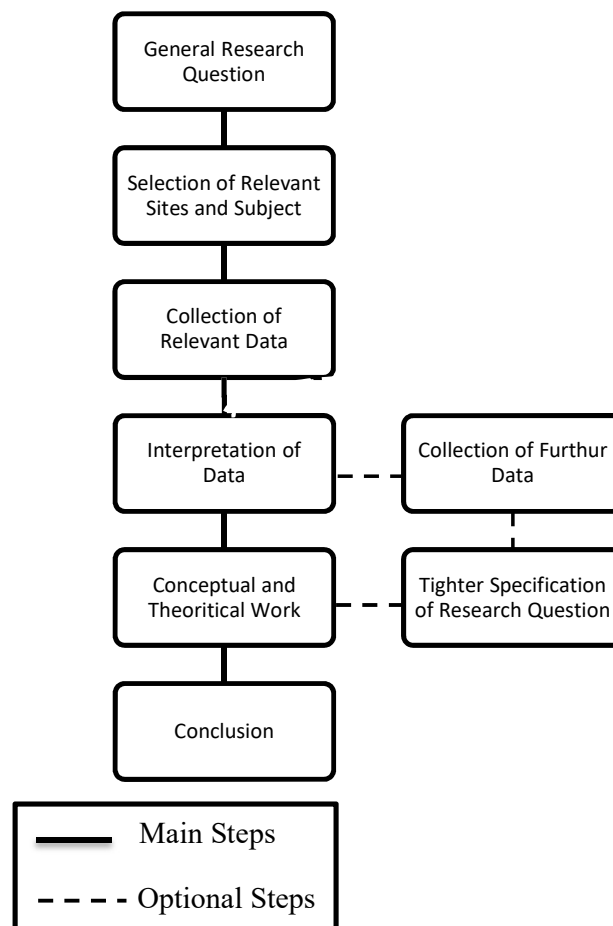
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data sekunder yang didapatkan dari berbagai sumber tertulis yang tersedia antara lain jurnal, buku, laporan tahunan, berita dan sumber-sumber lainnya. Secara spesifik untuk data utama dalam penelitian ini berdasarkan, *The National Institute for Defense Studies* (NIDS, <http://www.nids.mod.go.jp/english/>) yang digunakan untuk membantu menganalisis mengenai *external threat*. Laporan tahunan dari *The International Institute for Strategic Studies* (IISS, <https://www.iiss.org/>) dengan *The Military Balance* yang merupakan penilaian tahunan atas kemampuan militer dan ekonomi pertahanan ditujukan untuk mendukung analisis dalam *national capability*. Serta dokumen resmi *Defense of Japan White Paper* (https://www.mod.go.jp/en/publ/w_paper/index.html).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian indirect non-reaktif, dengan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah melalui studi pustakan. Data-data yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang tersedia seperti jurnal, buku, laporan tahunan, berita dan situs resmi pemerintah berkaitan dengan penelitian ini seperti laporan dari *Ministry of Defense Japan*, dan lainnya. Data-data yang telah ditelusuri oleh peneliti dikaitkan dengan konsep dan teori yang digunakan.

3.5 Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis berdasarkan Bryman penelitian kualitatif sebagai berikut :



Gambar 3.1 Teknik Analisis Data (Bryman 2012, 384)

General research question pada penelitian kualitatif merupakan pertanyaan umum penelitian mengenai orientasi dan arah penelitian yang memiliki inti mengenai pertanyaan penelitian adalah apa yang ingin diketahui oleh peneliti dan seberapa penting hasil jawaban mengenai penelitiannya. Dilanjutkan dengan memilih subject yang relevan sehingga dapat membantu peneliti dalam menjawab pertanyaan penelitian. Lalu, peneliti mengumpulkan data yang relevant dengan penelitiannya serta melakukan interpretasi data dengan bantuan konsep dan teori yang penelitian sudah tentukan. Sehingga, peneliti mendapatkan hasil penelitian berupa tulisan karya ilmiah. Namun, jika dalam tahapan interpretasi data peneliti mengalami hambatan atau keraguan maka peneliti diharuskan melakukan pengumpulan data secara lebih lanjut dan mempersempit pertanyaan penelitian kemudian, menginterpretasikan data dengan teori dan konsep sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih optimal, Metode penelitian ini dipilih oleh peneliti dikarenakan mendukung langkah penelitian yang dilakukan dengan secara optimal dan relevan bagi peneliti sendiri.

BAB V

PENUTUP

Bab ini menyajikan simpulan dan saran yang diajukan oleh peneliti dalam penelitian ini. Pada bagian simpulan, peneliti memaparkan jawaban dari pertanyaan penelitian ini. Peneliti juga memberikan poin-poin utama dari kebijakan pertahanan Jepang. Pada bagian selanjutnya, saran peneliti diajukan kepada pihak terkait, khususnya pada para pengkaji Hubungan Internasional.

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dokumen serta sejumlah sumber data pendukung mengenai kebijakan pertahanan Jepang terhadap peningkatan kehadiran militer Tiongkok di Laut Tiongkok Timur yang telah dilakukan, dapat dihasilkan bahwa terjadi penguatan kapabilitas pertahanan Jepang khususnya pada *Japan Airbrone Self-defense Force* dan *Japan Maritime Self-defense Force* selama tahun 2016 hingga 2019. Faktor yang terlihat adanya kondisi aksi-reaksi antara Jepang dan Tiongkok yang menyebabkan dilemma keamanan diawali dari permasalahan sengketa perbatasan di wilayah Laut Tiongkok Timur yang berujung pada persaingan peningkatan kekuatan militer kedua negara yang berujung pada intensitas Tiongkok dalam melakukan pelanggaran batas teritorial Jepang.

Tingginya kehadiran militer Tiongkok menuntut Jepang sebagai negara yang wilayahnya dilakukan pelanggaran oleh negara lain melakukan *defense* dibandingkan dengan *offense* dengan upaya Jepang meningkatkan daya deteksi radar pertahanannya. Peningkatan jumlah Angkatan laut serta modernisasi aset militernya untuk dapat mengidentifikasi pesawat maupun kapal asing yang

masih kedalam wilayah teritorialnya dan dilakukan *scrambles* yang menjadikan fokus pemikiran peneliti berdasarkan kegiatan Tiongkok yang sudah melanggar batas hingga teritorial. Peneliti melihatnya sebagai suatu ancaman bagi kedaulatan Jepang dan bagaimana Jepang merespons ancaman tersebut bersifat Defensif dengan strategi *airospace superiority* terhadap ADIZ Tiongkok dan *maritime superiority* terhadap *anti access area denial*.

Karena itu kalau dilihat dari data pemaparan kapabilitas militer menunjukan adanya dominasi di wilayah Asia Timur dengan Tiongkok sebagai negara dengan jumlah kapabilitas militer tertinggi sedangkan Jepang berada dalam posisi kedua. Hal ini lantas bukan berarti Jepang berusaha menjadi negara yang agresif hanya saja Jepang dengan tujuannya berusaha menjadi negara yang normal seperti pada umumnya. Negara yang memiliki kemampuan militer yang kuat untuk dapat melakukan pertahanan terhadap negaranya sendiri tanpa bergantung secara menyeluruh terhadap US.

Penulis memprediksi bahwa kondisi yang terjadi pada Jepang akan terus berlangsung dalam beberapa tahun kedepan selama permasalahan sengketa teritorial di wilayah Laut Tiongkok Timur antara Jepang dan Tiongkok masih berlangsung maka kedua negara tersebut akan terus bersitegang dan berupaya untuk meningkatkan kapabilitas militer untuk mendukung pertahanan negara dari ancaman.

5.2 Saran

Penelitian ini hanya berfokus pada kedua negara yaitu Jepang dan Tiongkok. Meskipun jika dilihat lebih dalam tentu kedua negara memiliki Instrumen militer yang berbeda yang menjadikan perhitungan kekuatan tentu akan terdapat Error dan peneliti dalam hal ini memang menyadari hal tersebut dan mengalami keterbatasan dikarenakan untuk melakukan perhitungan secara teknologi militer menyeluruh penelitian secara langsung tentu dibutuhkan dibandingkan dengan penelitian melalui pustaka.

Selain itu teori *Offense-Defense* ini memiliki kekurangan dikarenakan tidak dapat mengukur secara rinci sejauh mana pengukuran bisa mengatakan bahwa case X merupakan total *Defense* dan sebaliknya. Kendati demikian, perhitungan kapabilitas militer secara pustaka belum tentu juga akan mencerminkan kapabilitas militer Jepang dan Tiongkok secara realitas dalam suatu kondisi Peperangan antar kedua negara. Dikarenakan satu satunya alat pengukuran yang paling benar untuk kapabilitas militer adalah perang itu sendiri (Paul, Wirtz, dan Fortmann 2004, 272).

DAFTAR PUSTAKA

- “Abenomics.” 2017. *The Government of Japan*.
- Atanassova-Cornelis, Elena, dan Frans-Paul van der Putten, ed. 2014. *Changing Security Dynamics in East Asia: A Post-US Regional Order in the Making?* London: Palgrave Macmillan UK.
<https://doi.org/10.1057/9781137364180>.
- BBC. 2006. “Abe Elected as New Japan Premier,” 26 September 2006.
<http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/5380366.stm>.
- BBC News*. 2014. “Japan Election: Voters Back Shinzo Abe as PM Wins New Term,” 13 Desember 2014, bag. Asia. <https://www.bbc.com/news/world-asia-30444230>.
- Bryman, Alan. 2012. *Social Research Methods*. 4th ed. Oxford ; New York: Oxford University Press.
- Bull Hedley. 1968. “Strategic Studies and its Critics.” Dalam *World Politics*.
- Burgess, Stephen. 2020. “Confronting China’s Maritime Expansion in the South China Sea: A Collective Action Problem,” 23.
- Buzan, Barry. 1987. *An Introduction to Strategic Studies*. London: Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1007/978-1-349-18796-6>.
- Cabinet Secretariat. 2022. “National Security Strategy.”

- Department of Defense United States of America. 1985. "Measure of Military Capability : a Discussion of Their Merits Limitations, and Interrelationships."
- Dobson, Hugo. 2016. "Asia's Rivalry Heats up as Japan and China Play Host at Separate Global Summits." *The Conversation*. 23 Mei 2016.
<http://theconversation.com/asias-rivalry-heats-up-as-japan-and-china-play-host-at-separate-global-summits-58897>.
- Easley, Leif-Eric. 2007. "Defense Ownership or Nationalist Security: Autonomy and Reputation in South Korean and Japanese Security Policies." *SAIS Review of International Affairs* 27 (2): 153–66.
<https://doi.org/10.1353/sais.2007.0028>.
- Evera, Stephen Van. 1984. "Offense-Defense and The Cause of War."
- Fravel, M Taylor. 2010. "Explaining Stability in the Senkaku (Diaoyu) Islands Dispute."
- Gramer, Lara Seligman, Robbie. 2019. "Trump Asks Tokyo to Quadruple Payments for U.S. Troops in Japan." *Foreign Policy* (blog). 15 November 2019. <https://foreignpolicy.com/2019/11/15/trump-asks-tokyo-quadruple-payments-us-troops-japan/>.
- Iida, Masafumi, dan Shinji Yamaguchi. 2016. *NIDS China Security Report 2016: The Expanding Scope of PLA Activities and the PLA Strategy*. Tokyo, Japan: The National Institute for Defense Studies.
- Imperial Diet. 1946. "Constitution of Japan." Prime Minister Office of Japan.
- "Japan Coast Guard - Government initiatives | Office of Policy Planning and Coordination on Territory and Sovereignty." 2023. 2023.
https://www.cas.go.jp/jp/ryodo_eg/torikumi/kaiho.html.

- Japan Ministry of Defense. 2021. "China's Activities in East China Sea, Pacific Ocean, and Sea of Japan." Japan Ministry of Defense.
- Jervis, Robert. 1978. "Cooperation under the Security Dilemma." *World Politics* 30 (2): 167–214. <https://doi.org/10.2307/2009958>.
- Johnson, Constance. 2008. "Fisheries Enforcement in European Community Waters Since 2002—Developments in Non-Flag Enforcement." *The International Journal of Marine and Coastal Law* 23 (2): 249–70. <https://doi.org/10.1163/092735208X272210>.
- Liff, Adam P. 2019. "China, Japan, and the East China Sea: Beijing's 'Gray Zone' Coercion and Tokyo's Response." *EAST ASIA*, 13.
- Los Angeles Times. 2012. "Japan Conservatives Win Landslide Election Victory." Los Angeles Times. 16 Desember 2012. <https://www.latimes.com/world/la-xpm-2012-dec-16-la-fg-wn-japan-conservatives-landslide-election-20121216-story.html>.
- Lowy Institute. 2023. "Military Capability - Lowy Institute Asia Power Index." Lowy Institute Asia Power Index 2023. 2023. <https://power.lowyinstitute.org/explore/military-capability/>.
- Manicom, James. 2014. *Bridging Troubled Waters: China, Japan, and Maritime Order in the East China Sea*. Washington, DC: Georgetown University Press.
- Manyin, Mark E. 2021. "The Senkakus (Diaoyu/Diaoyutai) Dispute: U.S. Treaty Obligations," 16.
- Mearsheimer, John J. 1994. "The False Promise of International Institutions." *International Security* 19 (3): 5. <https://doi.org/10.2307/2539078>.
- Milevski, Lukas. 2016. *The Evolution of Modern Grand Strategic Thought*. First edition. Oxford, United Kingdom: Oxford University Press.

- “Military Units: Air Force.” 2012. U.S. Department of Defense. 2012.
<https://www.defense.gov/Experience/Military-Units/Air-Force>.
- Ministry of Defense Japan. 2016. “On the Publication of Defense of Japan 2016.”
- . 2017. “On the Publication of Defense of Japan 2017.”
- . 2018. “On the Publication of Defense of Japan 2018.”
- . 2019. “On the Publication of Defense of Japan 2019.”
- . 2020. “On the Publication of Defense of Japan 2020.”
- . 2023. “Overview Japan Defense Policy.”
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2020. “Opinion Poll on Japan.” Ministry of Foreign Affairs of Japan. 2020.
<https://www.mofa.go.jp/policy/culture/pr/index.html>.
- Paul, T. V., James J. Wirtz, dan Michel Fortmann, ed. 2004. *Balance of Power: Theory and Practice in the 21st Century*. Stanford, California: Stanford University Press.
- Schmidt, Sebastian. 2014. “Foreign Military Presence and the Changing Practice of Sovereignty: A Pragmatist Explanation of Norm Change.” *American Political Science Review* 108 (4): 817–29.
<https://doi.org/10.1017/S0003055414000434>.
- Stephen M. Walt. 1987. *The Origins of Alliances*. Cornell University Press.
- “The Military Balance.” 2016. *The Military Balance* 116 (1): 5–6.
<https://doi.org/10.1080/04597222.2016.1127558>.
- “———.” 2017. *The Military Balance*.

“———.” 2018. *The Military Balance* 118 (1): 5–6.

<https://doi.org/10.1080/04597222.2018.1416963>.

“———.” 2019. *The Military Balance*.

“———.” 2020. *The Military Balance*.

United Nations. 1970. “United Nations Convention on the Law of the Sea.”

United Nations.

———. 1982. “United Nation Convention on the Law of the Sea.” *Law of the Sea Convention*.

Valencia, Mark J. 2014. “The East China Sea Disputes: History, Status, and Ways Forward.” *Asian Perspective* 38 (2): 183–218.

<https://doi.org/10.1353/apr.2014.0008>.

Waltz, Kenneth N. 1979a. “Theory of International Politics,” 255.

———. 1979b. “Theory of International Politics,” 255.